

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka

Yudi Agusman ¹; Puji Prio Utomo ²

^{1,2} Universitas Sembilanbelas November Kolaka, yudiagusmanusn@gmail.com

Abstrak

Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonom daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan segala potensi-potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Sani-Sani sebagai salah satu Sumber pendapatan di Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Sani-Sani Kabupaten Kolaka yang berdasar pada indikator pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, dan pemerintah sebagai fasilitator belum terlaksana secara maksimal.

Kata kunci : *Pemerintah, Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD).*

Abstract

The role of village government in village development in the era of regional autonomy is very important, which directly supports local governments in building their own regional foundations. In order to support the implementation of village autonomy, it is necessary to increase and develop all the potentials of economic resources in Sani-Sani Village as one of the sources of income in the village. The purpose of this study is to find out and describe how the Village Government's Strategy in Increasing Village Original Income in Sani-Sani Village, Samaturu District, Kolaka Regency. The research method used is a qualitative descriptive method, data obtained through observation, interviews, and literature studies. The results showed that the development of collaborative governance-based tourism villages in Sani Sani Tourism Village, Kolaka Regency, which is based on indicators from the government as a regulator, the government as a dynamicator, and the government as a facilitator has not been carried out optimally.

Keywords : *Pemerintah, Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD).*

Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonom daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri (Hamid, 2011).

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Koberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan menyejahterakan masyarakat (Adisasmita, 2006)

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika Pendapatan asli Desa bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan segala potensi-potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Sani-Sani sebagai salah satu Sumber pendapatan di Desa.

Dalam hal peningkatan pendapatan desa, diharapkan pembentukan badan usaha milik desa, dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, yaitu: Badan Usaha Milik Desa.

Desa Sani-Sani memiliki visi terwujudnya profesionalisme kinerja aparatur pemerintah desa menuju terciptanya pemerintahan yang baik

(*Good Governance*). Profesionalisme kinerja aparaturn Pemerintahan Desa Sani-Sani adalah perwujudan keahlian dan tingkah laku serta kualitas perangkat Desa Sani-Sani yang profesional sesuai dengan bidang dan urusan masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Desa Sani-Sani juga memiliki salah satu misinya adalah mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik misi ini merupakan upaya pemerintah Desa Sani-Sani untuk mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka yang telah ditetapkan oleh SK bupati Kolaka no 188 tahun 2020 bulan 9 menjadi desa pariwisata karena memiliki alam yang indah serta laut yang luas dan memperoleh anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat, rincian pendapatan Desa Sani-Sani secara keseluruhan, yaitu Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 15.585.307, Dana Desa sebesar Rp 1.037.000.100, Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 25.372.000, Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 21.853.600, Bagi Hasil Penarikan Retribusi Malam sebesar Rp 12.137.875, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 704.131.100, sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Desa Sani-Sani adalah sebesar Rp 1.816.079.982.

Adapun rincian belanja pemerintah Desa Sani-Sani selama tahun 2021 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 726.862.380.-. Bidang pembangunan desa sebesar Rp 908.387.100, Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp 42.235.000, Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp 149.395.875.

Jika kita melihat antara jumlah dana desa dan realisasi pembelanjaan desa maka SILPA (Sisa lebih perhitungan anggaran) menunjukkan bahwa terjadi perbedaan Desa Sani-Sani sebesar Rp 115.000.000,-. Berdasarkan SILPA (Sisa lebih perhitungan anggaran) maka realisasi pendapatan desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp 1.816.079.982.- jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran desa yang sebesar Rp. 1.931.079.982.- maka dibutuhkan strategi pemerintah desa dalam menutupi defisit anggaran sehingga tidak terjadi lagi defisit dalam hal ini strategi dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Keberadaan Desa Sani-Sani sebagai desa pariwisata seharusnya dapat menutupi segala kekurangan anggaran yang ada di desa. Adapun target dan realisasi dari pendapatan asli desa melalui pungutan retribusi pariwisata tahun 2020 yakni sebesar 30 juta sampai 50 juta berdasarkan hasil musrembang desa namun yang terealisasi sebanyak Rp. 13.573.201 sementara di tahun 2021 dengan nilai target yang sama di tahun 2020 namun terealisasi sebanyak Rp. 15.585.307.- ini membuktikan bahwa target

belum tercapai dari apa yang telah di sepakati bersama dalam kegiatan musrembang desa, maka dibutuhkan Peran untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

Salah satu studi yang dilakukan Hasmiati (2021) terkait peran pemerintah dalam mengelola objek wisata, serta untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pengelolaan sektor pariwisata di Desa Kayuangin, Kab. Kolaka. Sedangkan penelitian yang memfokuskan di Desa Sani-Sani masih belum ditemui. Sehingga perlunya dilakukan kajian ini lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015). Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yaitu melalui wawancara dan data sekunder yang berupa catatan-catatan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun informan penelitian ini ialah yaitu Kepala Desa, sekretaris desa, Pengelola Wisata, tokoh Masyarakat Desa Sani-sani dan Pengunjung. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Studi*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) melalui observasi dan wawancara. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dalam penelitian penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2015)

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka

Peranan Pemerintah adalah peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai dengan memperhatikan 3 dimensi peran yaitu Pemerintah sebagai regulator, Pemerintah sebagai dinamisator, Pemerintah sebagai fasilitator (Yusuf, 2014). Maka ketiga dimensi tersebut dapat mempengaruhi peran Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli Desa.

Oleh karena itu Pemerintah Desa Sani-Sani dapat meningkatkan pendapatan asli Desanya melalui pengelolaan pembangunan wisata yaitu:

- a. Pantai indah kapu salah satu destinasi wisata yang terletak di Desa Kapu Kecamatan.Samaturu Kabupaten Kolaka, dengan pesona Pantai yang indah dan hamparan pasir yang terbentang luas memberikan sensasi tersendiri buat para wisatawan, Pantai indah Kapu yang berjarak sekitar 26 kilometer dari pusat Kota Kolaka ini, membutuhkan waktu kurang lebih stengah jam sampai di lokasi, selain pantainya yang bersih, pengurus Pantai indah Kapu juga menyediakan fasilitas permainan wahana air banana boat kepada wisatawan yang datang, tarif perorang hanya di bandrol dengan harga Rp.25.000.00dan biaya administrasi masuk sebanyak Rp.5.000.00 perorang sudah termasuk parkir kendaraan. adapun pendapatan pantai indah Kapu dalam perbulan sebanyak (Rp. 4.800.000).
- b. Puncak indah Kapu memiliki pemandangan yang menakjubkan saat berada di puncak indah Kapu para pengunjung bisa melihat Kota Kolaka dan teluk Bone dari ketinggian. dan bisa berfoto di lokasi dengan awan yang menggantung jika beruntung. persis seperti diatas negri awan. pemandangan indah ini, tak hanya bisa di saksikan di pagi hari, tetap juga bisa menyaksikan indahnya matahari terbenam di Puncak indah Kapu. adapun biaya admnistrasi masuknya sebanyak (Rp.5.000.00). pendapatan Puncak indah Kapu dalam perbulan sebanyak (Rp.2.300.000)
- c. Sarabba madu, minuman khas Desa Wisata Sani-Sani yang dinikmati minumannya sambil menikmati pemandangan sawah yang terbenam lepas sampai kelaut dan juga bisa menikmati gugusan Pulau Padamarang, suasana sunset dari Cafe Sarabba madu menjadi pemandangan indah apabila kita sedang berfoto.dan biaya administrasinya tidak ada tetapi wajib membeli minuman khasnya dengan harga Rp.10.000.00 adapun pendapatan Sarabba madu dalam perbulan sebanyak (Rp.1.500.000.00).

Fokus Penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) Kecamatan.Samaturu Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian akan di uraikan berdasarkan dimensi yang ada dalam uraikan pada fokus penelitian, dengan berbagai data dan fakta penelitian tentang peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.

a. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Maksud dari bentuk peran

Pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi antara lain dengan membuat peraturan dalam bidang ekonomi, juga dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi, maksud dari kebijakan ekonomi adalah tindakan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, secara umum kebijakan ekonomi di bedakan menjadi kebijakan perdagangan, dan kebijakan tenaga kerja.

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil dan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti akan menyajikan hasil observasi, wawancara secara langsung dengan informan yang untuk mendeskripsikan sejauh mana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, seperti yang dikatakan bapak AM S.H (45) selaku Kepala Desa Sani-Sani mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa selalu mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, terutama pendapatan yang di peroleh melalui pengelolaan wisata, seperti pembangunan wisata, puncak dan saraba madu, serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan dalam penyusunan pengelolaan wisata sudah sesuai dengan aturan yang di tetapkan pada aturan SK Bupati Kolaka No.188.45/316/2020 tentang penetapan Desa wisata.” (AM, 2020)

Hal yang sama di katakan oleh bapak I (46) selaku sekretaris Desa Sani-Sani mengatakan bahwa:

“kalau peraturan Desa yang memuat tentang pendapatan pengelolaan pembangunan wisata itu tidak ada, tetapi kalau yang mengatur soal anggaran ya tentu pengelolaanya itu sendiri artinya kopras sebagai pengelolaan dalam mengatur soal anggaran pengelola wisata .” (I, 2022).

Kemudian Bapak R (48) selaku Masyarakat Desa Sani-Sani mengatakan bahwa:

“kalau pengelolaan wisata Sani-Sani sangat antusias sekali dalam menjalankan tugasnya dan dapat memenuhi kebutuhan pengunjung selama berada di Daerah obyek wisata dan memberikan kepuasan kepada parawisatawan serta menimbulkan kesan baik tentang obyek yang di kelola”. (R, 2022)

Hal yang sama di katakana oleh bapak AM S.H (45) selaku kepala Desa Sani-Sani mengatakan bahwa:

“yah kalau pengelolaan wisata itu tujuannya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. dan kalau pengelola wisata tidak ada maka wisata tidak akan berjalan dengan baik, dan pengelola wisata harus memberikan kepuasan kepada pengunjung pariwisata.” (AM, 2020)

Dari uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola Wisata dapat berjalan dengan baik.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator, peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif atau membuat suatu motivasi dan efektif kepada masyarakat (Yusuf, 2014)

Dalam arti luas Pemerintah adalah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi Pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka di tempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah. arti kata dinamisator dalam kamus besar (KBBI) adalah menimbulkan/menjadikan hal atau benda yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. pemerintah sebagai dinamisator berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penggerak, meningkatkan kapasitas pemberdayaan petani, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan, meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif.

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil dan yang telah di uraikan sebelumnya peneliti akan menyajikan hasil observasi, wawancara secara langsung dengan informan yg telah dipilih, adapun hasil penelitian adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, peneliti melakukan wawancara bagaimana pembimbingan oleh pengelolaan wisata seperti yang dikatakan oleh bapak AM (45) selaku kepala Desa Sani-Sani mengatakan bahwa :

“kalau dalam pengelolaan manajemennya ini kan sesuai dengan ADRT (anggaran rumah tangga) koperasi jadi kalau pembimbingan pengelola wisata di dampingi oleh Dinas pariwisata itu sendiri terus Dinas Provinsi dan kementerian juga dan itu semua yang bina pembimbingan pengelola wisata.” (AM, 2022)

Kemudian bapak S (47) selaku pengelola wisata Desa Sani-Sani mengatakan bahwa:

“dalam hal peningkatan wisata itu tentu peningkatan SDM (sumber daya manusia) nya juga dalam hal pengelolaan, terus peningkatan lokasi wilayah wisata dan peningkatan atraksinya serta perlengkapan sarana dan prasarana nya yah itu semua yang di lakukan dalam peningkatan wisata.” (S, 20220)

Dari hasil wawancara diatas tentunya hal yang dilakukan dalam pembimbingan dan pengarahan sesuai dari koperasi nya itu sendiri.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. sebagai fasilitator (Yusuf, 2014). Dalam arti luas pemerintah adalah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka di tempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah. fasilitator merupakan individu atau kelompok yang memberikan bantuan guna memperlancar suatu program atau kegiatan sekelompok masyarakat, sehingga jalanya suatu program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mengurangi segala hambatan. peran pemerintah sebagai fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan.

Untuk mendeskripsikan sejauh mana peran pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, peneliti melakukan wawancara apa saja yang menjadi fasilitas utama yang di sediakan oleh pengelola, dan adakah biaya administrasi masuknya. seperti yang di katakan bapak R (48) selaku Masyarakat Sani-Sani mengatakan bahwa:

“tentu antraksinya aksibilitasnya artinya saran prasarananya disini apakah fasilitasnya seperti kelayakan wc, kelayakan standarlisasi kasebo, standar rumah ibadahnya, apa antraksinya antaraksi di lautnya seperti bagaimana banana bootnya , apakah di safety terus bagaimana juga dalam keamanannya,dan biaya administrasi masuknya itu sebanyak 5.000.000 per-orang dan itu sudah termasuk biaya parkir.” (R, 2022)

Kemudian bapak I (46) selaku sekretaris Desa Sani-Sani mengatakan bahwa:

“kalau anggaran yang di gunakan dalam pengeolaan wisata itu mulai dari awal sampai sekarang sekitaran Rp 100.000.000. jutaan lebih mulai dari pendirinya terus pengelolaan Wisata itu sendiri mulai dari lapangan, tempat parkir apa semua sekitaran Rp 100.000.000 jutaan lebih.” (I, 2022).

Berdasarkan pada fokus penelitian sebelumnya pada peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa. dengan data keseluruhan berupa beberapa hasil wawancara informan yang disajikan diatas maka dapat menunjukkan ketentuan peraturan daerah kab.kolaka Nomor. 37 tahun 2001 tentang kedudukan keuangan kepala desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa bahwa keberadaan kepala desa dan

perangkat desa mempunyai arti yg sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yg berdaya guna dan berhasil guna. namun yang kita lihat bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban dan pengelolaan Desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). menurut (Sedarmayanti, 2014) peranan merupakan sebuah landasan yg di gunakan setiap orang yg berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.

Menurut (Soekanto, 2009), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). (Westra, 1989) mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya fungsi atau tugas tentang suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang di tentukan. Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan, dan pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur kegiatan pelaksanaan pemberdayaan (Yusuf, 2014).

Hasil penelitian aspek dalam meningkatkan pendapatan asli Desa dalam menjalankan pengelolaan wisata mereka melakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh SK Bupati Kolaka No 18845/316/ tahun 2020 dan telah terlaksana dengan baik sampai saat ini namun Pemerintah Desa belum mengeluarkan aturan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa melalui pembangunan wisata. Pemerintah sebagai dinamisor peran Pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat (Yusuf, 2014). Hasil penelitian aspek dalam meningkatkan pendapatan asli Desa dimana dalam partisipasi pembangunan dan pengarahan/pembimbingan masih belum berjalan dengan baik, dan seharusnya Pemerintah harus memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat Pemerintah dan pihak swasta.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. sebagai fasilitator (Yusuf, 2014). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah di laksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status telah melaksanakan kewajibannya (Soekanto, 2009).

Hasil penelitian aspek dalam meningkatkan pendapatan asli Desa dimana dalam sarana prasarananya masih dalam proses tahapan pembangunan, dalam pembangunan wisata pemerintah telah menggunakan anggaran sebanyak Rp 100.000.000 lebih. Pemerintah juga menggunakan sumber dana dari Kabupaten sebanyak Rp.44.000.000 yang di gunakan dalam pembuatan jalan masuknya dan pemerintah menetapkan biaya administrasi masuknya sebanyak Rp 5.000.000 per-orang dan itu sudah termasuk biaya parkir.

Kesimpulan

terlaksana secara maksimal berdasarkan dari indikator sebagai berikut: Pemerintah sebagai regulator: selama ini pendapatan terbesar desa adalah pendapatan yang di peroleh dari pembangunan wisata yang ada di Desa Sani-Sani. faktor penghambat untuk meningkatkan pendapatan asli Desa melalui wisata selama ini sudah cukup bisa diatasi oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa setiap tahun selalu meningkatkan pembangunan wisata supaya dapat menambah pendapatan pembangunan wisata. dengan meningkatnya pendapatan wisata maka pendapatan asli Desa juga meningkat seiring berjalanya waktu setiap tahunnya. pemungutan biaya administrasi masuknya untuk meningkatkan pembangunan wisata juga di gunakan untuk gaji pengelola wisata. Pemerintah sebagai dinamisor: dalam pembangunan pariwisata peran Pemerintah sebagai motivator di perlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Pemerintah sebagai fasilitator: peran yg dilakuka Pemerintah sebagai koordinator yaitu melakukan koordinasi dengan instansi dan pembuatan strategi, fasilitator, peran yg dilakukan Pemerintah yaitu menyediakan sarana dan prasarana dan menciptakan startegi promosi.

Referensi

- Adisasmita, R. (2006). *Pengembangan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamid, A. (2011). Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. *Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 35.
- Hasmiati, H., Massyat, M., & Yuyun, S. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata di Desa Kayuangan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
- Sedarmayanti. (2014). *Samber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandan Maju.
- Soekanto. (2009). *Peranan Aspek Dinamis Kedudukan*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Westra, P. (1989). *Manajemen Pembangunan Daerah. Bandung*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Yusuf, I. (2014). *Kemakmuran dan Kemandirian Masyarakat*. Jakarta: Mandan maju.